**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL**

**SEKOLAH DAERAH (BOSDA)**

 **(Studi Kasus Pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri)**

**SKRIPSI**

 **Oleh :**

**Sarjana**

**NIM. 16. 01. 0053**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWASTAMANDIRI**

**SURAKARTA**

**2020**

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL**

**SEKOLAH DAERAH (BOSDA)**

 **(Studi Kasus Pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri)**

# Skripsi

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swastamandiri Surakarta**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Strata**

**Satu (S1) Program Studi Akuntansi**

**Oleh :**

**Sarjana**

**NIM. 16. 01. 0053**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWASTAMANDIRI**

**SURAKARTA**

**2020**

ii

**SKRIPSI**

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL**

**SEKOLAH DAERAH (BOSDA)**

**(Studi Kasus Pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri)**

**Oleh :**

**Sarjana**

**NIM. 16. 01. 0053**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

pada tanggal, 15 Agustus 2020

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swastamandiri

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

 **Pembimbing** **Ketua Dewan Penguji**

**Merangkap Anggota Dewan Penguji**

 **Amru Sukmajati, SP.,MM** **Dr. Abu Bakar Akbar, MM** **Anggota Dewan Penguji**

 **Slamet Santosa, SE.,MM**

Surakarta, 15 Agustus 2020

Mengetahui,

# Amru Sukmajati, SP.,MM

# Ketua STIE Swastamandiri

****

iii

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

# Nama : Sarjana

Nim : 16.01.0053

# Judul Skripsi : PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) (Studi Kasus Pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan dan ringkasan – ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti / dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh STIE Swastamandiri batal saya terima.

 Surakarta, 15 Agustus 2020

 Yang Membuat pernyataan

 materai 6000

 **Sarjana**

 **NIM. 16. 01. 0053**

iv

iv

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**SWASTAMANDIRI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, Skripsi dengan judul :

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL**

**SEKOLAH DAERAH (BOSDA)**

#  (Studi Kasus Pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri)

Oleh :

**Sarjana**

###### **NIM. 16. 01. 0053**

Telah saya baca dengan seksama dan telah dinyatakan memenuhi standar ilmiah, baik jangkauannya maupun kualitasnya, sebagai skripsi jenjang pendidikan sarjana (S1)

**Pembimbing :**

# Amru Sukmajati, SP.,MM

Tugas akhir ini telah diserahkan kepada Program Sarjana Jurusan Akuntansi STIE Swastamandiri dan telah diterima sebagai syarat memenuhi jenjang pendidikan sarjana (S1)

Surakarta, 15 Agustus 2020

**Ketua Program Studi Akuntansi**

# Yuni Pristiwati NW., SE., MSi

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

v

Skripsi ini kami persembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Ayah dan Ibu tercinta
3. Keluarga dan saudara - saudara yang saya sayangi
4. Dosen Pembimbing
5. Kepada rekan-rekan mahasiswa seangkatan yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Almamater

**HALAMAN MOTTO**

vi

*“.........Ilmu itu lebih baik dari pada harta, ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu akan berkurang jika dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah jika diamalkan……”*

**(Sayyidina Ali)**

*“….Barang siapa yang menghendaki dunia wajib atasnya dengan ilmu, barang siapa mengehendaki akhirat maka wajib atasnya dengan ilmu dan*

*barang siapa yang menghendaki kedua-duanya maka*

*wajib atasnya dengan ilmu….”*

**(H. R Bukhari)**

 “…*Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk….”*

**(Imam An Nawawi)**

**KATA PENGANTAR**

vii

vii

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) (Studi Kasus Pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri)”.**

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat penulis laksanakan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada beberapa pihak tertentu :

1. Bapak Amru Sukmajati, SP., MM.. selaku Ketua STIE Swastamandiri Surakarta
2. Ibu Yuni Pristiwati Noer W., SE., Msi, selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Bapak. Amru Sukmajati, SP., MM,. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan waktu dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Suyamto, S.Pd., selaku Kepala SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri, yang telah membantu dan memberikan waktu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Akuntansi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis menyelesaikan studi di STIE Swastamandiri Surakarta
6. Teman-teman sekelas Angkatan 2016, yang telah melewatkan waktu bersama selama masa studi.

Penulis sadar masih banyak sekali kekurangan dari skripsi ini, dan penulis terbuka terhadap segala saran dan kritik yang membangun. Akhir kata penulis mempersembahkan skripsi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Surakarta, 15 Agustus 2020

 Penulis

viii

**DAFTAR ISI**

Halaman Sampul i

Halaman Judul ii

Halaman Pengesahan iii

Halaman Pernyataan Keaslian, bermaterai iv

Halaman Persetujuan v

Halaman Persembahan vi

Halaman Motto vii

Kata Pengantar viii

Daftar Isi ix

Daftar Gambar . xii

Daftar Tabel . xiii

Daftar Lampiran . xiv

Abstrak (Inggris dan Indonesia) xv

BAB I. PENDAHULUAN 1

* 1. Latar Belakang Masalah 1
	2. Rumusan Masalah 4
	3. Tujuan Penelitihan 4
	4. Manfaat Penelitihan 4
	5. Sistematika Pembahasan 5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 7

2.1 Landasan Teori 7

2.1.1 Pengertian Transparansi 7

2.1.2 Tujuan Transparansi 8

2.1.3 Manfaat Transparansi 9

2.1.4 Pengertian Akuntabilitas 9

2.1.5 Manfaat Akuntabilitas 11

2.1.6 Pengertian Pengelolaan 11

ix

2.1.7 Fungsi Dasar Pengelolaan 12

2.1.8 Pengertian BOSDA 16

2.2 Review Penelitian Terahulu 26

2.3 Perumusan Hipotesis 28

2.4 Kerangka Berpikir 28

BAB III. METODOLOGI PENELIITIAN 30

* 1. Metode Penelitian 30
	2. Populasi dan Sampel 31
	3. Data Penelitian 32
	4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalisasi Variabel 33
	5. Metode Analisis Data 35

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 41

 4.1 Deskripsi Objek Penelitian 41

 4.2 Analisis Data 44

 4.3 Pembahasan 52

BAB V. PENUTUP 54

* 1. Kesimpulan 54
	2. Keterbatasan Penulisan 54
	3. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**DAFTAR GAMBAR**

x

xi

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 29

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 42

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas *P-P Plot* 46

Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastastisitas *Standardized Scatterplot* 47

xi

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 26

Tabel 3.1 Skor/bobot nilai berdasarkan Skala Likert 33

Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 34

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi 43

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas 44

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan dana BOSDA 44

Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Item Instrumen Penelitian 45

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonierita**s**  46

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda 48

Tabel 4.7 Hasil Uji t (Parsial) 49

Tabel 4.8 Hasil Uji F (Uji Bersama-sama) 50

**DAFTAR LAMPIRAN**

xii

xii

Lampiran 1 Blangko Konsultasi Skripsi

Lampiran 2 Kuesioner

Lampiran 3 Tabel Jawaban Kuesioner

Lampiran 4 Hasil Uji SPSS 25 *for Windows*

xiii

**ABSTRAK**

Perwujudan dari tanggung jawab pemerintah terhadap pendanaan penyelenggaraan pendidikan salah satunya adalah melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dana BOSDA berasal dari APBD Provoinsi Jawa Tengah kemudian disalurkan ke dinas pendidikan Kabupaten yang berada diseluruh Jawa Tengah termasuk Kabupaten Wonogiri. Dana BOSDA harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan pemerintah. Akuntabilitas dan Transparansi dapat meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana BOSDA sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOSDA yang diterima oleh setiap sekolah di Kabupaten Wonogiri.

Tujuan peneltian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu berupa kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Staff dan Guru ditambah perwakilan komite sekolah. Dengan sampel sebanyak 50 responden. Data dianalisis dengan metode statistic menggunakan program komputer SPSS 25 untuk Windows.

Hasil dari penelitian ini yaitu, (1) Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%; (2) Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%; (3) Transparansi dan Akuntabilitas secara Bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%.

*Kata Kunci : Transparansi*, *Akuntabilitas, Pengelolaan Dana BOSDA*

 .

xiv

***ABSTRACT***

*The government provides regional school operational assisted fund (BOSDA) as one of their programs to support education. This fund is come from the cental java province budget plan (APBD) and then granted to all the local education offices in all provinces. This fund must be managed properly so as not to harm the government. Accountability and transparency are expected to increase the effectiveness of the regional school operational assisted fund (BOSDA) management so that it can be well used and well reported by every school in Wonogiri Regency.*

*This research aimed to find out the effect of accountability and transparency towards BOSDA fund in SMP Negeri 2 Slogohimo Wonogiri Regency.*

*This research used questionnaires as its tool to collect the primary data. The population of this study were all staff and teacher plus a school committee representative SMP Negeri 2 Slogohimo Wonogiri Regency, with a sample of 50 respondents.*

*The results indicated that (1) Transparency has a significant effect on the BOSDA fund management in SMP Negeri 2 Slogohimo Wonogiri Regency. This is evidenced by the significance level off 0,12 which is smaller than 0,05 or 5% (2) Accountability has a significant effect on the BOSDA fund management in SMP Negeri 2 Slogohimo Wonogiri Regency. This is evidenced by the significance level off 0,000 which is smaller than 0,05 or 5% (3) Together Transparency and Accountability has a significant effect on the BOSDA fund management in SMP Negeri 2 Slogohimo Wonogiri Regency. This is evidenced by the significance level off 0,000 which is smaller than 0,05 or 5%*

*Keywords: Transparency, Accountability, Effectiveness of BOSDA*

xv

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan. Menurut Siswoyo, dkk (2013: 52) lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas serta berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan tersebut dapat bersifat lingkungan fisik, sosial dan budaya yang semuanya memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pendidikan. Belum memadainya tempat pendidikan (gedung sekolah, sarana olahraga dan rekreasi), perlengkapan, alat pendidikan, materi pendidikan, kurangnya kerjasama antara berbagai lembaga dalam masyarakat, rendahnya pendidikan penduduk serta biaya pendidikan yang relatif mahal pada umumnya dapat menghambat berlangsungnya pendidikan dengan baik.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia.

1

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional

Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan bermutu/gratiS, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri menyediakan pembiayaan operasional sekolah dalam bentuk BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Menurut Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau Dan Bermutu/Gratis, Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah penyediaan pembiayaan operasional pendidikan dasar untuk sekolah yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri.

Majunya suatu negara bermula dari pendidikan yang layak dan berkulitas. Pendidikan berkualitas tentunya dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Berbagai masalah pendidikan yang ada, pemerintah memegang pernanan penting dalam memudahkan akses pendidikan, seperti yang kita ketahui bahwa akses pendidikan di Indonesia masih dikatakan sulit mengingat tingginya biaya pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggara pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” guna mendukung perluasan akses pendidikan.

Dalam upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mutu pendidikan serta menekan angka putus sekolah, pemerintah memperluas akses pendidikan yang lebih bermutu, luas dan merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada keluarga miskin perhatian tersebut berupa pemberian BOSDA. Tujuan program ini adalah untuk perluasan dan pemerataan pendidikan guna membantu mengentaskan kemiskinan melalui kemudahan dalam akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu agar mendapat kehidupan masa depan yang lebih baik.

Program BOSDA ini beriringan dengan program BOS Nasional (BOSNAS) yang sebelumnya telah dijalankan untuk membantu penyediaan dana bagi peserta didik tidak mampu pada jenjang pendidikan. Program BOSNAS merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke sekolah baik Negeri maupu Swasta sebagai pelaksana program wajib belajar. Bantuan yang diberikan program BOSNAS lebih mengacu kepada bantuan non personalia seperti pemenuhan kebutuhan paket buku bagi para peserta didik tidak mampu di sekolah. Program BOSDA dibentuk untuk menjadi pendamping bagi program BOSNAS serta diharapkan agar dapat menutupi kekurangan BOSNAS yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat dengan dengan tujuan yang sama yaitu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu guna meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat agar tetap mampu memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Masalah paling signifikan didunia pendidikan adalah biaya, tidak sedikit anak-anak yang tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan masyarakat menganggap bahwa biaya sekolah terlalu besar. Ini jelas menjadi sebuah permasalahan yang tidak bisa dianggap sebelah mata, tidak hanya biaya saja yang menjadi masalah utama tetapi ada factor lain seperti kurangnya kesadaran orangtua akan pentingnya sekolah bagi anakanak mereka. Oleh sebab itu dibuat Program Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan yang menyeluruh. Dengan adanya program BOSDA diharapkan bisa meningkatkan motivasi peserta didik untuk melanjutkan sekolah walau mengenyam status keluarga yang kurang mampu sekalipun.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) (Studi Kasus Pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri)”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri?
2. **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

1. **Manfaat Penelitian**
2. **Bagi instansi**

Penulisan ini diharapkan bisa memberi masukan/input bagi pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

1. **Bagi Pihak Lain**

Sebagai bahan infomasi dan referensi dalam penelitian mendatang.

1. **Bagi Peneliti**

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan pengalaman dalam menganalisis masalah dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sekaligus dapat menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh, dengan dunia kerja.

1. **Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara lengkap, maka penulis mengelompokkan isi materi ke dalam beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

 Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

 masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

 penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

 Pada bab tinjauan pustaka ini menjelaskan beberapa landasan

 teori dan konsep dasar yang sesuai dengan penelitian dan beberapa

 daftar pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan metodologi yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian, obyek penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, Instrumen Penelitian, teknik analisis data dan pengujian kredibilitas data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan mengenai ada atau tidaknya pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri, kemudian menilai dan menyimpulkan masalah tersebut

BAB V PENUTUP

 Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang

 kesimpulan dan saran dari pembahasan bab sebelumnya dan saran bagi

pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri serta keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**
2. **Pengertian Transparansi**

Menurut Didjaja (2013 :25) dan kemudian dipertegas kembalai pada Arif (2017:17), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakankebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Ardianto (2014 :50), dan kemudian di pertegas kembali pada Setiyanningrum (2017 :11) Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Minarti, (2011 ; 224). “Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.”

Menurut Nico, (2007 ; 20.) “Transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh- sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Ardana (2009) berpendapat bahwa transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi.

Menurut Tanjung, (2011) Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2006) transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

7

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua waraga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau didepan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetaui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apasaja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah Minarti, (2011 ; 224).

Dari beberapa pemaparan para tokoh mengenai definisi transparansi, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan sekolah adalah keterbukaan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah khususnya dalam manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai informasi keuangan.

1. **Tujuan Transparansi**

Adapun tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh *stakeholders* dan lembaga adalah:

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan- peyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
4. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.
5. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal.

Dari adanya tujuan transparansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi dapat meminimalisir penyimpangan- penyimpangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik, dan tercapainya tujuan.

1. **Manfaat Transparansi**

Menurut Kristianten (2014:50), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Menurut Minarti, (2011 ; 224). “Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.”

Menurut Nico, (2007 ; 21) beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Mencegah korupsi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha. kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu ‘mengukur’ kinerja lembaga.
4. Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Dari pendapat para ahli mengenai manfaat transparansi, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya transparansi merupakan suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan mencegah terjadinya tindak kecurangan.

1. **Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Ardianto (2014:97), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Sujarweni (2015) Akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Minarti, (2011 ; 225.) menjelaskan bahwa, “Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.”

Mulyasa, (2003 ; 177-178.) mengemukakan akuntabilitas adalah, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir anggaran sekolah dengan dikeluarkannya dana selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah. Menurut Halim (2012) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic, (Mursyidi, 2013).

Menurut Asmani , (2012 ; 220-221.) ada tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu :

1. Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai kompenen dalam mengelola sekolah,
2. Adanya standar kinerja, disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya,
3. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Dari beberapa pemaparan ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

1. **Manfaat Akuntabilias**

Menurut Waluyo, (2007 : 182) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Publik,* upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk :

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terciptanya transparansi dan *responsiveness* organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan *responsive* terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntabilitas dapat menjamin kepercayaan public, terciptanya keterbukaan informasi, dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif.

1. **Pengertian Pengeloaan**

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengertian pengelolaan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karya Aditya Bagus Pratama disebutkan bahwa, pengelolaan berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggrakkan tenaga orang lain (Aditya Bagus Pratama, 2012: 323).

Menurut Balderton yang dikutip Adisasmita, (2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya dalam Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Djamarah (2006 :174) pengelolaan sama artinya dengan manajemen :  “... istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen. Manajemen adalah kata aslinya dari bahasa Inggris, yaitu *management*yang berati ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan”. Sedangkan menurut Choirunnida yang dikutip (Djamarah, 2006 : 174) menjelaskan pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan yang mendapat imbuhan pe-an menjadi pengelolaan yang artinya mengurus suatu perusahaan dan organisasi dan sebagainya.

1. **Fungsi Dasar Pengelolaan**

Menurut Terry dalam (Torang, 2016 : 166) membagi empat fungsi dasar manajemen (pengelolaan), yaitu : ‘

1. Perencanaan (*planning*),
2. pengorganisasian (*organizing*),
3. pengarahan (*actuating*),
4. pengawasan (*controlling*)’.

Fungsi-fungsi dasar manajemen tersebut bersifat universal, dimana saja dan dalam organisasi apa saja. Oleh sebab itu, agar manajemen pada organisasi dengan mudah mencapai tujuannya secara efektif, efisien dan rasional maka seorang pimpinan organisasi harus mampu menjalalankan fungsi-fungsi dasar manajemen tersebut.

1. Perencanaan (*planning*)

Terry (Torang, 2014 : 69) menegaskan bahwa : ‘*Planning is the selecting and relating of facts in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired result’.*Pendapat Terry ini dapat diartikan bahwasanya perencanaan adalah penetapan tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Dapat pula diartikan bahwa perencanaan adalah persiapan, acuan, garis-garis besar pedoman kerja, persiapan tertentu untuk sampai ke tujuan yang akan dicapai.

Menurut Robbins (Torang, 2016 : 167), perencanaan adalah proses pendefinisian sasaran organisasi, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun keseluruhan rencana kemudian diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan aktivitas organisasi.

Perencanaan dalam arti luas menurut Adisasmita (2011:22) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatankegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai.

Tjokroadmudjoyo (dalam Adisasmita, 2011:24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah direncanakan. Selanjutnya Westra, dkk (dalam Adisasmita, 2011:24) mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

1. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu proses mendistribusikan pekerjaan dan tugas-tugas serta mengkoordinasikannya untuk mencapai tujuan organsasi. Manullang (Torang, 2016 : 171) berpendapat bahwa  pengorganisasian adalah pengelompokan aktivitas yang akan dilakukan atau pendistribusian tugas dan fungsi kepada setiap individu yang ada dalam organisasi. Di samping itu, pengorganisasian juga dimaksudkan untuk menentukan dan menetapkan kedudukan serta sifat hubungan antar masing-masing unit.

menurut Hasibuan (2006:118), pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktitas tersebut.

Proses pengorganisasian menurut Malayu S.P. Hasibuan (2006:127) adalah sebagai berikut:

1. Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang dapat dicapai, apakah provite motive atau service motive.
2. Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengetahui, merumuskan dan menspesifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan.
3. Pengelompokan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengelompokan kegiatan-kegiatan kedalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama. Kegiatan-kegiatan yang bersamaan dan berkaitan erat disatukan kedalam satu departemen atau satu bagian.
4. Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen.
5. Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan jumlah karyawan pada setiap departemen atau bagian.
6. Peranan perorangan, artinya manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan, supaya tumpang tindih tugas dapat dihindarkan.
7. Tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang akan dipakai.
8. Struktur, artinya manajer harus menetapkan struktur organisasi yang bagaimana yang akan dipergunakan.
9. Pengarahan (*actuating*)

Istilah *actuating*(penggerakkan) ini disebut pula dengan istilah *directing*(pengarahan). Menurut Sutarno (2004 : 110) Pengarahan (*actuating*) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam.

Pengarahan menurut G.R. Terry dalam Malayu S.P. Hasibuan, (2006:187) adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Lebih lanjut Harold Koontz dan Cyril O Donnel dalam Malayu S.P. Hasibuan, (2006:187) mengemukakan bahwa pengarahan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata.

1. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen menurut Sutarno (2004 : 111) dilaksanakan untuk mengetahui :

1. Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya;
2. Apakah di dalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan;
3. Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan;
4. Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi.

Menurut Siswanto (2009:139) pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai maka dicari faktor penyebabnya. Penemuan faktor penyebab ini berguna untuk melakukan tindakan perbaikan (corrective action). Sujamto (dalam Adisasmita, 2011:25) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan kenyataan yang sebenarnya dan semestinya

1. **Pengertian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)**

BOSDA adalah Bantuan Operasional Sekolah yang berasal dari APBD yang ditujukan untuk mendukung dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program Wajib Belajar.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009, standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 tahun 2019, Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuran Swasta, dan Sekolah Luar Biasa Swasta Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau Dan Bermutu/Gratis, Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah penyediaan pembiayaan operasional pendidikan dasar untuk sekolah yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri.

Maksud dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Meringankan beban Biaya Operasional Sekolah
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
3. Meringankan beban biaya operasional terutama bagi siswa miskin pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

Pengelolaan Dana BOSDA juga harus mengacu pada konsep
Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management)* yang
terdiri dari :

1. Swakelola dan partisipatif

Pelaksanaan program dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, swakelola berarti
pengelolaan sendiri. Swakelola yang dimaksud disini adalah swakelola
dalam pengadaan barang barang/jasa pemerintah. Pengadaaan dengan
swakelola menta lainnya, atau oleh kelompok masyarakat. Salah satu aspek penting dalam menerapkan konsep Manajemen
Berbasis Sekolah adalah partisipasi dari masyarakat. Partisipasi
penting untuk meningkatkan rasa memiliki, peningkatan rasa memiliki
akan meningkatkan rasa tanggung jawab, dan peningkatan tanggung
jawab akan meningkatkan dedikasi/kontribusi. Menurut Krina (2003:25) partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Engkoswara (2012:295) partisipasi adalah proses dimana *stakeholders* terlibat aktif baik dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan
pegawasan/evaluasi pendidikan di sekolah. Melalui dewan sekolah
(*school council),* orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam
pembuatan berbagai keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat
lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam
pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Besarnya
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut mungkin apat menimbulkan tumpang tindih kepentingan antara sekolah, orang
tua dan masyarakat. Dengan demikian perlu dibatasi bentuk partisipasi
setiap unsur secara jelas dan tegas (Mulyasa, 2009:28).

1. Transparan

Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.

Menurut Engkoswara (2012:295) manajemen sekolah dilaksanakan secara transparan, mudah diakses anggota, manajemen memberikan laporan secara kontinu sehingga *stakeholders* dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Manajemen pendidikan yang transparan memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan keyakinan *stakeholders* terhadap kewibawaan dan citra sekolah yang *good governance* dan *clean governance.* Menurut Krina (2003:14) transparasi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Krina, prinsip transparansi memiliki dua aspek yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparasi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang baerkaitan dengan kepentingan publik dalam hal ini adalah masyarakat dan warga sekolah dapat diperoleh secara langsung. Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.

Krina (2003:15) menjelaskan bahwa prinsip transparasi paling
tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik
tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses - proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran
informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.
4. Akuntabel

Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah disepakati. Menurut PP no 48 Tahun 2008 pasal 59, prinsip akuntabilitas dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2009:20) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan atas suatu aktvitas secara ekonomis dan efisien kepada pemberi tanggung jawab. Menurut Nanang Fattah (2013:93), ukuran pendidikan yang akuntabel adalah :

1. Tujuannya jelas dan dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus
2. Kegiatannya dapat diawasi agar selalu dapat mengarah pada
pencapaian tujuan
3. Hasilnya efektif karena tujuan tercapai
4. Proses pencapaian hasil itu efisien dengan mengingat sumbersumber yang tersedia
5. Menjalankan mekanisme umpan balik untuk penyempurnaan.

Tuntutan akuntabilitas sekolah sebagai salah satu sektor publik adalah untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal
(*horizontal accountability)* bukan hanya pertanggungjawaban vertikal
(*vertical accountability).* Menurut Ellwood (dalam Mardiasmo
2002:21), ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh
organisasi sektor publik yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability
for probity and legality)*
2. Akuntabilitas proses *(process accountability)*
3. Akuntabilitas program *(program accountability)*
4. Akuntabilitas kebijakan *(policy accountability)*

Menurut Krina (2003:9) prinsip akuntabilitas menuntut dua hal
yaitu :

1. Kemampuan menjawab *(answerability)*

Kemampuan menjawab berhubungan dengan tuntutan bagi
para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaanpertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

1. Konsekuensi (*consequences)*
2. Demokratis

Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.

Menurut James A Beane dan Michael W Apple (dalam Dede
Rosyada, 2004:15) ada beberapa kondisi yang perlu dikembangkan
dalam upaya membangun sekolah demokratis yaitu :

1. Keterbukaan saluran ide dan gagasan sehingga semua orang bisa
menerima informasi seoptimal mungkin.
2. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok
dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan
berbagai persoalan sekolah.
3. Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, masalah dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah.
4. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan
terhadap persoalan-persoalan publik.
5. Ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak
minoritas.
6. Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah
mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi
harus terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan
hidup manusia.
7. Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan
mengembangkan cara-cara hidup demokrasi.

Inti dari teori tersebut adalah bahwa sekolah demokratis akan
terwujud jika semua informasi penting dapat dijangkau *stakeholder*sekolah sehingga semua unsur tersebut memahami arah
pengembangan, berbagai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah
yang sedang atau akan ditempuh. Dengan demikian mereka akan bisa
menganalisis relevansi kebijakan, memahami, mengkritisi dan
memberi masukan, serta menentukan kontribusi dan partisipasi yang
akan diberikan untuk kesuksesan pelaksanaan program-program
sekolah tersebut.

1. Efektif dan efisien

Pemanfaatan dana harus efektif dan efisien. Siswa yang
dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya harus diseleksi
secara seksama dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Menurut Mulyasa (2005:82), efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil menempatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota.

Masih menurut Mulyasa (2005: 89) suatu kegiatan dikatakan efektif jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Menurut Dharma (dalam Mulyasa, 2005:89) efisiensi mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Dharma juga menjelaskan bahwa efisiensi juga merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, perbelanjaan dan masukan, biaya, serta kesenangan yang dihasilkan.

1. Tertib administrasi dan pelaporan

Sekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

Menurut Sutarto (1982:14) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Menurut Sutarto (1982:9) administrasi digolongkan dalam dalam rangkaian kegiatan yaitu :

1. Dilakukan oleh sekelompok orang
2. Berlangsung dalam suatu kerjasama
3. Dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan

Salah satu cabang ilmu administrasi menurut Sutarto (1982:58)
adalah ilmu administrasi keuangan. Ilmu administrasi keuangan
membahas tentang segenap rangkaian kegiatan penataan penyusunan
anggaran, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, pembukuan dan
pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerjasama sekelompok
orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ilmu administrasi keuangan
menurut Sutarto (1982:68) adalah pencatatan segenap penerimaan dan
pangeluaran biaya dalam kerjasama itu. Pengkajian terhadap cabang
ilmu ini menghasilkan pengetahuan yang cukup luas dan penting
dengan nama pembukuan.

Menurut Reeve (2008:22) laporan keuangan merupakan catatan
dan rangkuman kegiatan transaksi untuk menyediakan informasi
akuntansi kepada pemangku kepentingan. Menurut Suwardjono
(2005:20) tujuan utama pelaporan keuangan organisasi nonbisnis
seperti sekolah adalah harus menyediakan informasi yang bermanfaat
bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun
potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang
alokasi dana ke organisasi tersebut. Adapun tujuan-tujuan Spesifik dari
pelaporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan
pemakai lain dalam menilai jasa-jasa yang disediakan organisasi
dan kemampuannya untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut.
2. Menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan
pemakai lain dalam menilai bagaimana para manajer organisasi
nonbisnis telah melaksanakan tanggungjawab kepengurusannya
dan aspek-aspek lain kinerjanya.
3. Menyediakan informasi tentang sumberdaya, kewajiban dan
sumberdaya (aset) bersih organisasi, dan akibat-akibat dari
transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya dan
hak atas sumberdaya tersebut.
4. Menyediakan informasi tentang kinerja organisasi selama satu
periode.
5. Menyediakan informasi tentang bagaimana organisasi
mendapatkan dan membelanjakan kas atas sumber likuid lain,
tentang pinjaman dan pelunasannya, dan tentang faktor lain yang
dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
6. Pelaporan keuangan harus mencakup penjelasan-penjelasan dan
interprestasi untuk membantu para pemakai memahami informasi
yang disediakan.

Menurut Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Yang terjangkau Dan Bermutu/Gratis, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SMP wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan secara administratif atas penerimaan uang, pemotongan pajak dan pembayaran belanja sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melalui Bendahara Pengeluaran Paling lambat tanggal 5 awal bulan berikutnya.

1. Saling percaya

Pemberian dana berlandaskan pada rasa saling percaya
(*mutual trust*) antara pemberi dan penerima dana. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya diartikan sebagai mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata ; mengangap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada ; dan menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur. Pengertian percaya dalam penelitian ini adalah yakin terhadap orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan dana BOSDA jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya. Kepercayan yang dimaksud yaitu orang tua percaya pada kepala sekolah untuk mengembangkan program-program sekolah menuju idealitas yang diinginkan dan kepala sekolah juga percaya pada guru untuk mengambangkan program-program kurikulernya serta mengorganisir pelaksanaan program-program itu.

1. **Review Penelitian Terdahulu**

 Review penelitian terdahulu sangat penting dilakukan oleh peneliti. Manfaat review penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui apa yang telah dihasilkan dan apa perbedaan dari peneliti sebelumnya, berikut review penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
| 1. | Hani Fitria (2014)  | *Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**(Studi pada SMK PGRI Pandaan)*  | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menunjukkan hasil yang efektif. Hal ini ditunjukan dengan hasil keseluruhan perhitungan yang mencakup indikator ketepatan sasaran mempunyai nilai rata-rata 3,67, indikator sosialisasi program dinyatakan efektif dengan hasil perhitungan rata-rata 3,62, indikator tujuan program dinyatakan efektif dengan hasil perhitungan rata-rata 3,55 dan indikator pemantauan program dinyatakan efektif dengan menunjukkan hasil perhitungan nilai rata-rata 3,47. Apabila diprosentasekan, penelitian ini menunjukkan bahwa SMK PGRI Pandaan sudah efektif dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 71,6%. |
| 2. | Ega Rezky Hastyarini (2015) | *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS**SMA) di SMA Negeri 1 Pejagon, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah**Tahun 2014* | Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Perencanaan Dana BOS SMA di SMA Negeri 1 Pejagoan dilakukan dengan menyusun RKAS oleh tim anggaran sekolah dengan diketahui oleh Komite Sekolah, guru, karyawan, dan orang tua siswa. Penyusunan RKAS dilaksanakan bersamaan dengan penyusunann RAB BOS SMA. (2) Pelaksanaan Dana BOS SMA, penyaluran Dana BOS SMA dalam dua tahap. Pengambilan Dana BOS SMA oleh Bendahara BOS. Penggunaan Dana BOS SMA diperuntukkanmembiayai kegiatan operasional sekolah nonpersonalia sebagaimana di petunjuk teknis BOS SMA. (3) Pengawasan dan Evaluasi dilakukan secarainternal oleh Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelaksanaan secara eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. |
| 3. | Rita Kala Linggi, dkk Tahun 2018 | *Studi Tentang Penggunaan Dana Bantuan**Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di**Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri Kota**Bangun Kabupaten Kutai Kartanegra* | Hasil penelitian menunjukan bahwa MTs Negeri Kota Bangun mengalokasikan anggarannya untuk belanja barang dan jasa, untuk belanja ATK, untuk belanja pegawai, dan untuk belanja modal. Faktor-faktor pendukung penggunaan Dana BOSDA di MTs Negeri Kota Bangun yaitu: adanya petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOSDA, adanya transparansi penggunaan dana BOSDA, jumlah siswa yang banyak, adanya kerja sama yang baik antara sesama komponen sekolah. Faktor-faktor penghambat penggunaan Dana BOSDA di MTs Negeri Kota Bangun yaitu: keterlambatan transfer oleh Pemerintah Pusat ke daerah, lamanya terbit Surat Pengantar Pencairan Dana oleh Tim Manajemen BOSDA Daerah, dan mekanisme birokrasi yang begitu panjang. |

1. **Perumusan Hipotesis**

Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Hipotesa I (H1) Diduga Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Hipotesa II (H2) Diduga Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Hipotesa III (H3) Diduga Transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

1. **Kerangka Berpikir**

Menurut pendapat dari Uma Sekaran (1992) yang dikutip Sugiyono (2013:88) menjelaskan bahwa: “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Untuk lebih detailnya maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar skema kerangka pemikiran berikut :

Akuntabilitas

(X2)

Transparansi

(X1)

H1 H2

H3

Pengelolaan Dana BOSDA

(Y)

**Gambar 2.1**

**Kerangka Berpikir**

**BAB III**

**METODOLOGI PENELITIAN**

1. **Metode Penelitian**

**Metodologi penelitian** adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu.  Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian..

Menurut Sugiyono (2003 : 11) menyatakan bahwa Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan menurut Sugiyono (2003 : 14) penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode ini memberikan penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi objek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Tipe hubungan dalam penelitian ini adalah korelasional, yaitu sekadar menemukan fakta yang berkaitan dengan teori/masalah yang diteliti. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

30

Menurut Burhan Bungin (2009:36) penelitian deskriptif bertujuan
untuk menjelaskan berbagai kondisi, situasi atau variabel yang timbul di
masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi.
Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dikumpulkan
menggunakan kuisioner atau angket merupakan data angka. Data tersebut
kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah
dibalik angka-angka tersebut.

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterprestasikan.

Penelitian dilaksanakan Pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri yang beralamat di Dusun Dawuhan, Sukoboyo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Obyek penelitiannya adalah pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri ditinjau dari prinsip Transparansi, Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Tertib Administrasi dan Laporan.

.

1. **Populasi dan Sampel**
2. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:115), “Populasi adalah wilayah generalisasi  terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Dalam penelitian ini populasinya adalah Seluruh Guru dan Staff SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri serta Anggota Komite Sekolah. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang yang terdiri dari 35 guru dan staff SMP Negeri 2 Slogohimo dan 15 anggota komite sekolah.

1. Sampel

Menurut Sugiyono (2008 : 116) “sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel yang diambil seluruhnya sama dengan populasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang yang diambil dari Seluruh Guru dan Staff SMP Negeri 2 Slogohimo ditambah perwakilan Anggota Komite Sekolah. Dikarenakan kesulitannya peneliti menghubungi seluruh anggota komite sekolah sehingga hanya sedikit saja sampel yang diambil dari anggota komite sekolah.

1. **Data Penelitian**
2. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen, bukti, catatan atau bahan – bahan laporan historis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang dikumpulkan, diolah dan disajikan sebagai berikut :

1. Data primer

Data yang diperoleh melalui yaitu data primer diperoleh dari Observasi secara langsung di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bukti, catatan atau hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya*.*

1. **Teknik Pengumpulan Data**

 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Kuisioner

Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan
untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang
pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi, 2010 : 194). Kuisioner ini digunakan untuk memperoleh data secara subjektif dari internal sekolah yang terdiri dari staf pengelola BOSDA dan komite sekolah mengenai pelaksanaan pengelolaan BOSDA SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Kuisioner ini terdiri atas beberapa pernyataan yang dapat memberikan informasi mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOSDA SMP Negeri 2 Slogohimo. Kuisioner ini diberikan kepada seluruh Guru dan Staff SMP Negeri 2 Slogohimo yang berjumlah 35 orang, serta Anggota komite sekolah yang berjumlah 15 orang.

Jawaban dari kuesioner kemudian ditransfer menjadi angka dengan pemberian nilai/skor dengan menggunakan skala likert berjenjang dari 1 sampai 5, sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**

**Skor/bobot nilai berdasarkan Skala Likert**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pertanyaan | Jawaban | Bobot Nilai |
| Sangat Setuju | SS | 5 |
| Setuju | S | 4 |
| Netral  | N | 3 |
| Tidak Setuju | TS | 2 |
| Sangat Tidak Setuju | STS | 1 |

Sumber : Sugiyono,( 2014:87), Metode Penelitian Bisnis

1. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010:274) Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di SMP Negeri 2 Slogohimo.

1. **Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalisasi Variabel**

Variabel merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, apa yang akan diteliti oleh peneliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2016 : 38), bahwa variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

* 1. Variabel independen atau variabel bebas (X)

Variabel Independen dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

1. Transparansi yang diberi notasi X1
2. Akuntabilitas yang diberi notasi X2.
	1. Variabel dependen atau variabel terikat (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini diberi notasi Y yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang selanjutnya diberi notasi Y.

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang menyatakan dengan cara menentukan pemikiran atau gagasan berupa kriteria-kriteria yang dapat diuji secara khusus bagi suatu penelitian menjadi variabel yang dapat diukur. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Definisi** | **Indikator** | **Pengukuran** |
| Transparansi(X1) | Menurut Nico, (2007 ; 20.) “Transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh - sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. | 1. Kesediaan dan Aksesbilitas Dokumen
2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi
3. Keterbukaan Proses
4. Kerangka Regulasi yang menjamin transparansi
 | Skala Likert |
| Akuntabilitas (X2) | Sri Minarti, (2011 ; 225.) menjelaskan bahwa, “Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.” | * + 1. Adanya *Standart Operating Prosedure* (SOP)
		2. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan SOP
		3. Adanya sangsi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
		4. Adanya output dan outcome yang terukur
		5. Adanya mekanisme *reward and punishment*
 | Skala Likert |
| Pengelolaan BOSDA(Y) | Menurut Balderton yang dikutip Adisasmita, (2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. | 1. Taat aturan
2. Prinsip kontinuitas
3. Berkomitmen
4. Segera mencatat transaksi
 | Skala Likert |

1. **Metode Analisis Data**

Dalam penelitian kuantitatif apabila semua data sudah terkumpul,
makalangkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisi data adalah
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara,catatan lapangan, dan dokumentasi dengan caramengorganisasikan
data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa,
menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri
sendiri dan orang lain.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif, metode
analisis yang digunakan yaitu analisis statistik. Dalam penelitian ini analisis
statistik yang akan digunakan yaitu :

1. Uji Validitas

Menurut Ahmad Tanzeh (2011;83) Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid atau shahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner untuk mengukur instrumen penelitian.

Uji validitas yang dipakai adalah validitas internal. Untuk menguji
validitas tiap item instrumen adalah dengan mengkorelasikan antara
skor-skor tiap item dengan skor total keseluruhan instrumen. Item
dikatakan valid, jika Rhitung > Rtabel dan sebaliknya. Untuk mengetahui
validitas instrumen pada penelitian ini dapat mengunakan rumus
korelasi *product moment* yang dibantu dengan Komputer seri program
*statistic SPSS versi 25.0 for windows*, dengan diketahui rumus *product
moment* sebagai berikut :

$$r\_{xy}= \frac{N\sum\_{}^{}XY-(\sum\_{}^{}X)(\sum\_{}^{}Y)}{\sqrt{(N\sum\_{}^{}X^{2}- \left(\sum\_{}^{}X\right)^{2})(N\sum\_{}^{}Y^{2}-(\sum\_{}^{}Y)^{2})}}$$

Keterangan:
rxy = koefisien korelasi

N = jumlah subyek

X = skor nomor tertentu

Y = skor total item

Perhitungan validitas dibantu dengan menggunakan *SPSS for Windows Release* 25 dan diuji cobakan pada 50 responden. Kemudian hasil r yang didapat dari perhitungan dibandingkan dengan harga r tabel *product moment.* Harga r tabel dihitung dengan taraf signifikan 5% dan n sesuai dengan
jumlah peserta didik yang diuji coba. Jika rxy > r tabel, maka dapat dinyatakan butir soal tersebut valid.

1. Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghozali (2011;41-42), Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau
konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS dengan uji statistik
*Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

Adapun rumus yang digunakan dalam menguji reabilitas
adalah menggunakan rumus *Alpha Cronbach* yang dibantu dengan
computer seri program statistic SPSS versi 18.0 dengan diketahui rumus
*Alpha Cronbach* sebagai berikut:

$$r\_{11}= \left(\frac{k}{k-1}\right)\left(1- \frac{\sum\_{}^{}α\_{b}^{2}}{α\_{1}^{2}}\right)$$

Keterangan :

r11 = reabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

$\sum\_{}^{}α\_{b}^{2}$ = jumlah varian butir

$α\_{1}^{2}$ = varian total

1. Uji Asumsi Klasik
2. Uji Normalitas

Uji kenormalan data dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan uji hipotesis. Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel terikat dan bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas *P-P Plot*. Pada uji *Normal P-P Plot* prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya, adapun dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis normal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi.

Untuk menguji reliabilitas instrumen digunakan program *SPSS 25 for windows*.

1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara variabel independen yaitu ekuitas merek. Jika terjadi korelasi maka ada gejala multikol yaitu adanya masalah multikol inearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independennya.

Menurut Ghozali (2013: 105). Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisiskorelasi antar variabel dan perhitungan nilai tolerance serta variance inflation factor (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% .Dan nilai VIF lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif..

1. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *Standardized Scatterplot*. Menurut Ghozali (2013: 139), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamat ke pengamat
yang lain. Jika variance dari residual satu pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran.. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan komputer program *SPSS 25 for windows*.

1. Pengujian Hipotesis

Analisis uji hipotesis dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan angket untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel X1 (tranparansi), X2 (akuntabilitas) dan variabel Y (pengelolaan dana bantuan BOSDA). Analisis yang dilakukan pada penelitian ini, antara lain:

1. Analisis Regresi linier berganda

Penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel terikat yaitu pengelolaan dana BOSDA (Y1) dengan 2 variabel bebas yaitu: transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2). Metode regresi untuk mengetahui hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas disebut *metode regresi linear berganda.*

Menurut Imam Gozhali.(2011;7) Analisis linier berganda adalah metode statistikuntuk menguji pengaruh antara satu variabel terikat
dengan lebih dari satu variabel bebas. Berikut cara menghitung regresi linier multipel dengan dua variabel bebas, menurut Neolaka (2014;140-141) dengan rumus sebagai berikut :

$$Y= a\_{0}+a\_{1}X\_{1}+a\_{2}X\_{2}$$

Atau bentuk lain

$$Y= a\_{1}X\_{1}+a\_{2}X\_{2}$$

1. Uji parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh signifikan atau tidak. Dalam penelitian ini transparansi dan akuntabilitas adalah sebagai variabel independen dan pengelolaan dana BOSDA adalah variabel dependen.

Pengujian hipotesis uji t menggunakan bantuan program *SPSS 25 for Windows* yaitu dengan membandingkan signifikansi hitung masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan taraf signifikansi 5%. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan SPSS apabila :

1. Probabilitas > taraf signifikan (5%), maka Ho diterima dan Ha ditolak.
2. Probabilitas < taraf signifikan (5%), maka Ho ditolak dan Ha diterima.
3. Uji bersama-sama (Uji F)

Uji bersama-sama (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Cara yang digunakan untuk uji F yaitu dengan melihat probabilitas signifikansi dari nilai F pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Dasar keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis apabila :

1. Probabilitas > taraf signifikansi (5%), maka Ho diterima dan Ha ditolak.
2. Probabilitas < taraf signifikansi (5%), maka Ho ditolak dan Ha diterima.

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Deskripsi Objek Penelitian**
2. **Sejarah Singkat**

Smp Negeri 2 Slogihimo adalah Sekolah Menengah Pertama yang berstatus sekolah negeri yang beralamat di Desa Sukoboyo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. SMP Negeri 2 Slogohimo saat ini memiliki 318 Siswa dan Siswi dengan 13 kelas, 35 Guru dan Staff, 38 Pelajaran Kurikulum K 13, 1 jurusan dan beberapa ekstra kulikuler.

SMP Negeri 2 Slogohimo berdiri sejak Juli 1994 dengan nama SMP Filial 1 Slogohimo yang bertempat di Balai Desa Sokoboyo dengan kepala sekolah bernama Drs. Soekarman . Selang berapa tahun kemudian SMP pindah ke SD Negeri 1 Sokoboyo, bergabung satu gedung dengan SD Negeri 1 Sokoboyo.

Pada Juli 1998 SMP negeri 2 Slogohimo resmi mendirikan gedung sendiri dengan Kepala Sekolah yang pertama kali yaitu Drs. Wahono Hadi Rusmanto. Setelah Kepala Sekolah pertama pensiun, kemudian digantikan oleh Drs. Purwanto. Setelah itu digantikam lagi dengan kepala sekolah yang baru yaitu Drs. Purwanto. Setelah itu kepemimpinan kembali bergati lagi dengan kepala Sekolah baru yaitu bapak Suharsono, S.Pd., M.M, setelah itu di gantikan lagi oleh Cuk Widada, S.Pd., M.M. dan selajutnya pada tahun 2016 digantikan lagi dengan Kepala Sekolah Baru yaitu Suyamto, S.Pd, beliau menjabat menjadi kepala SMP Negeri 2 Slogohimo sampai sekarang.

Jumlah siswa di SMP Negeri 2 Slogohimo mengalami peningkatan setiap tahunnya dan fasilitas yang juga semakin memadai, dengan bimbingan dari Bapak/Ibu guru yang berkualitas dan mempunyai pendidikan yang tinggi, SMP Negeri 2 Slogohimo siap menjadi sekolah yang melahirkan siswa-siswi yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Slogohimo Dari Masa ke masa :

1. Drs. Soekarman dari Tahun 1994 sampai Tahun 1998

41

1. Drs. Wahono Hadi Rusmanto dari Taheun 1998 sampai Tahun 2002
2. Drs. Purwanto dari Tahun 2002 sampai tahun 2007
3. Drs. Purwanto dari tahun 2007 sampai tahun 2009
4. Suharsono, S.Pd.M.M dari tahun 2009 sampai tahun 2012
5. Cuk widada, S.Pd., M.M dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016
6. Suyamto, S.Pd dari Tahun 2016 sampai sekarang.

Berikut ini kami uraikan secara rinci personal SMP Negeri 2 Slogohimo yang terdiri dari pimpinan, wali kelas, guru bidang studi dan staf tata usaha serta siswa secara keseluruhan.

1. Pimpinan, wali kelas, guru bidang studi dan tata usaha
2. Kepala Sekolah
3. Wali Kelas 13orang
4. Guru Bidang Studi 28 orang
5. Staf Tata Usaha 7 Orang
6. Siswa – siswi
7. Siswa – Siswi SMP Negeri 2 Slogohimo Terdiri dari 13 kelas dengan rincian sebagai berikut :
8. Kelas VII terbagi menjadi 5 kelas yaitu :
* Kelas VII A terdiri dari 32 siswa
* Kelas VII B terdiri dari 32 siswa
* Kelas VII C terdiri dari 24 siswa
* Kelas VII D terdiri dari 24 siswa
* Kelas VII E terdiri dari 24 siswa
1. Kelas VIII terbagi menjadi 4 kelas yaitu :
* Kelas VIII A terdiri dari 26 siswa
* Kelas VIII B terdiri dari 26 siswa
* Kelas VIII C terdiri dari 24 siswa
* Kelas VIII D terdirir dari 24 sisiwa
1. Kelas IX terbagi menjadi 4 kelas yaitu :
* Kelas IX A terdiri dari 30 siswa
* Kelas IX B terdiri dari 30 siswa
* Kelas IX C terdiri dari 29 siswa
* Kelas IX D terdiri dari 25 siswa
1. **Struktur Organisasi**

Berikut ini gambar struktur organaisasi tata usaha SMP negeri 2 Slogohimo.

**Ketua Komite Sekolah**

Ratno

**Kepala Sekolah**

SUYAMTO, S. Pd

**Koordinator Tata Usaha**

Sarjana

**Bendahara Gaji / BOSDA**

Sarjana

**Penjaga Malam**

Sukisno

**Oeperator Sekolah**

Arif Widayat

**Urusan Sarpras/Kepegawaian**

Hariyanto

**Tukang**

**Kebun**

Warto

**Pembantu Bendahara BOS**

Murni Suprahmi

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tata Usaha SMP Negeri 2 Slogohimo**

1. **Visi dan missi**

SMP Negeri 2 Slogohimo mempunyai visi yang baik. Dalam memgapai visi tersebut SMP Negeri 2 Slogohimo juga memiliki Misi. Adapun Visi dan Misi SMP Negeri 2 Slogohimo adalah :

Visi :

“Mewujudkan Insan Yang Beriman, Cerdas, Terampil dan Berkarakter “

Misi :

1. Menanamkan Nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan melalui pengamalan ajaran agama.
2. Melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan secara aktif, kreatif dan menyenangkan sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuna dan teknologi sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dan potensi peserta didik.
4. Membina kemandirian, kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan melalui kegitan pendidikan karakter.
5. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah mauapun dengan lembaga.
6. **Analisis Data**
7. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji validitas instrumen penelitian dilakukan terhadap 50 responden di luar sampel penelitian. Dengan N = 50, Berdasarkan analisis uji validitas dengan *bevariate pearson correlation* menggunakan komputer program *SPSS 25 for windows* hasil uji validitas variabel transaparansi dapat dirangkum sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi**

| Indikator | rhitung | rtabel | Sig (2-tailed) | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 0.706 | 0.278 | 0.000 | Valid |
| X2 | 0.649 | 0.278 | 0.000 | Valid |
| X3 | 0.827 | 0.278 | 0.000 | Valid |
| X4 | 0.709 | 0.278 | 0.000 | Valid |

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa item angket variabel transparansi sebanyak 4 soal. dari hasil analisis semua item layak digunakan sebagai alat pengumpul data.

Berdasarkan analisis uji validitas dengan menggunakan komputer program *SPSS 25 for windows* hasil uji validitas variabel akuntabilitas dapat dirangkum sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas**

| Indikator | rhitung | rtabel | Sig (2-Tailed) | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X2.1 | 0.747 | 0.278 | 0.000 | Valid |
| X2.2 | 0.597 | 0.278 | 0.000 | Valid |
| X2.3 | 0.630 | 0.278 | 0.000 | Valid |
| X2.4 | 0.738 | 0.278 | 0.000 | Valid |
| X2.5 | 0.779 | 0.278 | 0.000 | Valid |

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa item angket variabel akuntabilitas sebanyak 5 soal. dari hasil analisis semua item layak digunakan sebagai alat pengumpul data.

Berdasarkan analisis uji validitas dengan menggunakan komputer program *SPSS 25 for windows* hasil uji validitas variabel pengelolaan dana BOSDA dapat dirangkum sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan dana BOSDA**

| Indikator | rhitung | rtabel | Sig (2-Tailed) | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1.1 | 0.570 | 0.278 | 0.006 | Valid |
| Y1.2 | 0.882 | 0.278 | 0.000 | Valid |
| Y1.3 | 0.507 | 0.278 | 0.000 | Valid |
| Y1.4 | 0.506 | 0.278 | 0.000 | Valid |

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa item angket variabel transparansi sebanyak 4 soal, dari hasil analisis semua item layak digunakan sebagai alat pengumpul data. Hasil uji validitas secara lengkap terlampir.

Setelah diketahui validitas masing-masing item selanjutnya item-item yang sudah valid diuji reliabilitasnya. Untuk menguji reliabilitas instrumen digunakan program *SPSS 25 for windows* dengan uji statistik *Cronbach Alpha*, dengan ketentuan bila nilai *Cronbach Alpha* > 0,600 dikatakan reliabel. Rangkuman hasil uji reliabilitas dapat disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Item Instrumen Penelitian**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Variabel Penelitian | Jumlah Item | *Cronbach Alpha* | Ket. |
| 1 | Transparansi | 4 | 0,699 | *Cronbach Alpha* > 0,60 |
| 2 | Akuntabilitas | 5 | 0,739 | *Cronbach Alpha* > 0,60 |
| 3 | Pengelolaan dana BOSDA | 4 | 0.630 | *Cronbach Alpha* > 0,60 |

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk semua variabel > 0,60, sehingga dapat dikatakan reliabel. Berdasarkan hasil analisis uji validitas dan reliabilitas sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa item yang sudah teruji validitas dan reliabilitas telah memenuhi syarat sebagai instrumen baku yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebagaimana dijelaskan pada Bab III bahwa ada 3 macam uji yang digunakan untuk uji persyaratan analisis regresi yaitu: (1) uji normalitas; (2) uji multikolinearitas; (3) uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas *P-P Plot*. Pada uji *Normal P-P Plot* prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya, adapun dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: (1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis normal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. (2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi. Untuk menguji reliabilitas instrumen digunakan program *SPSS 25 for windows* adapun hasilnya adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas *P-P Plot***

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis normal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara variabel independen yaitu ekuitas merek. Jika terjadi korelasi maka ada gejala multikol yaitu adanya masalah multikol inearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independennya.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas**

**Model Collinearity Statistics**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tolerance** | **Tolerance** | **VIF** |
| TransparansiAkuntabilitas | 0.9140.914 | 1.0941.094 |

Dependent Variable: Pengelolaan dana BOSDA Sumber : Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Menurut Ghozali (2013: 105) suatu model regresi dikatakan bebas dari masalah multikolonieritas apabila nilai dari Variance Inflation Factor (VIF) < 10. Tabel 4.5. menjelaskan besarnya nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10, yaitu untuk variabel transparansi, nilai VIF 1,094 < 10; variabel akuntabilitas, nilai VIF 1,094 < 10. Maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

1. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *Standardized Scatterplot*. Data penelitian disebut heterosdastisitas jika bentuk sebaran nilai residual terstandar tidak membentuk pola tertentu (semakin membesar atau semakin mengecil) akan tetapi tampak random (Ghozali (2013: 105). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan komputer program *SPSS 25 for windows*. Hasil analisis *Standardized Scatterplot* adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastastisitas *Standardized Scatterplot***

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa, bentuk sebaran nilai residual terstandar tidak membentuk pola tertentu akan tetapi tampak random sehingga dapat disimpulkan data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.

1. Pengujian Hipotesis
2. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel terikat yaitu pengelolaan dana BOSDA (Y1) dengan 2 variabel bebas yaitu: transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2). Metode regresi untuk mengetahui hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas disebut *metode regresi linear berganda.* Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan komputer program *SPSS 25 for windows*, diperoleh data sebagai berikut:

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 8.797 | 2.100 |  | 4.189 | .000 |
| Transparasi | -.216 | .082 | -.229 | -2.626 | .012 |
| Akuntabilitas | .547 | .066 | .724 | 8.303 | .000 |
| a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana BOSDA |

**Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda**

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

Y= α + β1X1 + β2X2 + ε

P = β0 + β1 X1 + β3 X2+ ei

P = 8,797 - 0,216 X1 + 0,547 X2 + ei

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel di atas tampak semua variabel yaitu variabel X1 (transparansi) dan variabel X2 (akuntabilitas) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (pengelolaan dana BOSDA). Berdasarkan persamaan regresi berganda sebagaimana tertera di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka 8,797 artinya apabila variabel independen yaitu transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) dianggap 0, maka pengelolaan dana BOSDA naik sebesar 8,797 poin.
2. Angka -0,216 artinya apabila variabel independen yaitu akuntabilitas (X2) dianggap 0, dan variabel transparansi (X1) naik 1 point maka pengelolaan dana BOSDA turun 0,216.
3. Angka 0,547 artinya apabila variabel independen yaitu transparansi (X1) dianggap 0, dan variabel akuntabilitas (X2) naik 1 point maka pengelolaan dana BOSDA naik 0,547.
4. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh signifikan atau tidak. Dalam penelitian ini transparansi dan akuntabilitas adalah sebagai variabel independen dan pengelolaan dana BOSDA adalah variabel dependen.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan komputer program *SPSS 25 for windows*, diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 4.7. Hasil Uji t (Parsial)**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 8.797 | 2.100 |  | 4.189 | .000 |
| Transparasi | -.216 | .082 | -.229 | -2.626 | .012 |
| Akuntabilitas | .547 | .066 | .724 | 8.303 | .000 |
| a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana BOSDA |

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yang dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Transparansi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Hal ini dapat dibuktikan dari koefisien regresi sebesar -0,216 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.. Hal ini dapat dibuktikan dari koefisien regresi sebesar 0,547 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.
3. Uji Bersama-sama (Uji F)

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji F Statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent dengan variabel dependent, yaitu untuk mengetahui pengaruh transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2), terhadap pengelolaan dana BOSDA (Y). Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan komputer program *SPSS 25 for windows*, diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Hasil Uji F (Uji Bersama-sama)**

|  |
| --- |
| **ANOVAa** |
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 74.092 | 2 | 37.046 | 48.463 | .000b |
| Residual | 35.928 | 47 | .764 |  |  |
| Total | 110.020 | 49 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana BOSDA |
| b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparasi |

Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 48,463 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

1. **Pembahasan**

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

1. Pengaruh X1 (Transparansi) terhadap Y (pengelolaan dana BOSDA)

Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,216 dengan signifikansi sebesar 0,012, dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05, karena lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi (X1) berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa diduga Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri diterima.

1. Pengaruh X2 (Akuntabilitas) terhadap Y Pengelolaan Dana BOSDA )

Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,547 dengan signifikansi sebesar 0,000, dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05, karena lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Dana BOSDA. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan diduga Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri diterima.

1. Uji Bersama-sama (Uji F)

Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 48,463 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOSDA (Y) di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Dengan demikian jika transparansi dan akuntabilitas dibangun dengan sungguh-sungguh, maka akan dapat meningkatkan pengelolaan dana BOSDA, Secara parsial transparansi memiliki pengaruh lebih kecil dengan nilai jika dibandingkan dengan akuntabilitas hal ini di buktikan dengan nilai t hitung sebesar -2.626 untuk transparansi, sedangkan akuntabilitas dengan nilai t hitung sebesar 8.303.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.  Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan di duga Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri terbukti.
2. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga hipotesis kedua (H2) yang menyatakan di duga akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri terbukti.
3. Transparansi dan Akuntabilitas secara Bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan Diduga transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri terbukti.
4. **Keterbatasan Penulisan**

Penelitian tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitaas terhadap pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain :

54

1. Penelitian ini terbatas pada populasi SMP Negeri 2 Slogohimo dengan sampel penelitian yang kecil sehingga memiliki kelemahan dalam menggeneralisasi hasil penelitian ini.
2. Dikarenakan kesulitannya peneliti menghubungi seluruh anggota komite sekolah sehingga hanya sedikit saja sampel yang diambil dari anggota komite sekolah.
3. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas maka saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengenalan dan peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan dana BOSDA yang baik terhadap pegawai, sehingga natinya dapat meningkatkan kinerja pegawai SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain dalam penelitian selanjutnya, seperti lingkungan kerja, motivasi kerja, fasilitas kerja, kompensasi, pelatihan, dan lain – lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Hafiz Tanjung. 2011. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta : BPFE UGM

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu

A. G. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis.* Yogyakarta : Teras

Adrianto, Nico, 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government.* Malang : Bayumedia Publishing,

Amos Neolaka. 2014. Metode Penelian dan Statistik. Bandung : Remaja Rosdakarya

Ardana, Komang dkk. 2009. *Perilaku Keorganisasian.* Yogyakarta. Graha Ilmu

Ardianto, Elvinaro dkk. 2014. *Komunikasi Massa.* Bandung : Simbiosa Rekatama

Dede Rosyada. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Modal Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta : Prenada Media

Didjaja. 2013. *Menuju Mayarakat Swadaya dan Swakelola*. Klaten: Cempaka
Putih

Dwi Siswoyo, dkk. 2013. Ilmu Pendidikan. Yogyakarta : UNY Press

Engkoswara dan Aan Komariah. 2012. *Administrasi Pendidikan*. Bandung : Alfabeta

E. Mulyasa, 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah.* Bandung : PT. Remaja Rosda Karya

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2005. *Menjadi Guru Profesional.* Bandung : PT. Remaja Rosda Karya

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2009. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional.* Cet. Ke-X. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Hamdi, Muchlis. 2014.  *Kebijakan Publik Proses, Analisis,* *dan Partisipasi*. Bogor : Ghalia Indonesia

Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Aktiva Tetap*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta : Raja. Grafindo Persada

Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan. Masalah,* Edisi Revisi, Bumi Aksara:Jakarta

Howlett, Michael, dan M. Ramesh (1995) *Studying Public Policy: Policy Cyles and Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Press.

Imam Ghozali, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program
IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program
IBM SPSS.* Edisi Tujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Jamal Ma’ruf Asmani, 2012. *“Tips Aplikasi Manajemen Sekolah”,* Jogjakarta : DIVA Press,

Krina, L. Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi. Jakarta : Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kristianten. 2014. *Akuntabilitas Kinerja Berkonsep Value for Money Pada
Instansi Pemerintah*. Yogyakarta : Ekonisia.

Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 (1)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi

Muhibbin Syah.2010. *Psikologi Pendidikan dengan pendekatan baru*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.* Bandung : Refika Aditama

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Pratama, Aditya Bagus. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, , Surabaya : Pustaka Media. Press

Santoso, Singgih. 2003. *Mengatasi Berbagai Masalah Statistic Dengan SPSS versi 11.5.* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Satori, Djaman dan Komariyah, Aan. 2014 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Setyaningrum. 2017. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah.* Bumi Aksara. Yogyakarta

Siagian, Sondang P, 2006, *Organisasi Kepemimpinan Dan Prilaku Administrasi*, Jakarta : Penerbit Gunung Agung

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2006, *Teori Dan Kepemimpinan*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta,

Siswanto, H. B. 2009. *Pengantar Manajemen,* Jakarta : Bumi Aksara,

Sri Minarti, 2011. *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri,* Yogyakarta : Ar-Ruzz Media

Sugiyono. 2010. *Penelitian Deskriptif Kualitatif (Validitas Dan Realibitas* *Penelitian Kualitatif). Jakarta:* Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.CV

Sujarweni, W.V. 2015. Sistem Akuntansi. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Sutarno NS. 2004. *Manajemen Perpustakaan.*Jakarta : Samitra Media Utama

Sutarto. 1982. *Dasar – Dasar Organisasi.* Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan.* Edisi III. Yogyakarta : BPFE

Syaiful Bahri Djamarah. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta : Rineka Cipta

Torang, Syamsir. 2014. *Filsafat Ilmu : Organisasi & Manajemen*. Bandung : Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2016. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung : Alfabeta.

Waluyo, 2007. *Manajemen Publik,* Bandung : Mandar Maju

Warren, Reeve, dan Fess. 2008. *Pengantar Akuntansi*, *Edisi Dua Puluh Satu*, Jakarta : Salemba Empa

Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh* *Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia,* *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri* *Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes.*Jakarta: Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Johan Arif Indrajaya, 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Implementasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Kurnia, Feni, dkk.2014.Analisis Bahan Ajar Fisika SMA Kelas XI di Kecamatan Indralaya Utara Berdasarkan Kategori Literasi Sains. *Jurnal Inovasi dan Pembelajaran Fisika Volume 1 Nomor 1*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 Tahun 1993. Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau Dan Bermutu/Gratis.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Sekolah
Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, Dan
Sekolah Luar Biasa Swasta Di Provinsi Jawa Tengah.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional